

**PENGARUH SISTEM PELAYANAN FISKAL
TERHADAP PENERIMAAN KAS NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD MUHAJIR
NPM : 05 833 0035**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**PENGARUH SISTEM PELAYANAN FISKAL
TERHADAP PENERIMAAN KAS NEGARA
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA
MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**MUHAMMAD MUHAJIR
NPM : 05 833 0035**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SISTEM PELAYANAN FISKAL TERHADAP
PENERIMAAN KAS NEGARA PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN**

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD MUHAJIR

NPM : 05 833 0035

JURUSAN : AKUNTANSI



**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

(H. H. ARIFIN LUBIS, Ak., MM)

Pembimbing II

(SARI BULAN TAMBUNAN, SE.,)

Ketua Jurusan

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, MSi.)

Dekan



(PROF. DR. H. SYA'AD AFIFUDDIN, MEc.)

RINGKASAN

MUHAMMAD MUHAJIR, PENGARUH SISTEM PELAYANAN FISKAL TERHADAP PENERIMAAN KAS NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN, (Di bawah bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., Sebagai Pembimbing I dan Saribulan Tambunan, SE., Sebagai Pembimbing II).

Devisa merupakan dana pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan negara kita. Atas dasar tersebut, maka penggunaan devisa perlu dihemat dan diarahkan pada berbagai usaha produktif. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan pengaturan pembayaran fiskal dalam tahun berjalan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri.

Setiap tahunnya jumlah Orang Pribadi yang berangkat ke Luar Negeri melalui Bandara Polonia mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah ini menjadi sorotan dan pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Hal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah dengan meningkatkan sistem pelayanan fiskal di Bandara Polonia Medan.

Bagi orang pribadi berdomisili di wilayah tertentu yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan terlebih dahulu membayar fiskal. Disisi lain bahwa orang pribadi yang akan berangkat ke luar negeri akan dibebaskan atas pembayaran fiskal luar negeri. Pembebasan ini dapat bersifat langsung yang diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dan pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak.

Menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian pembebasan fiskal luar negeri, maka petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini tidak dilakukan, untuk menekan terjadinya penyimpangan yang dilakukan Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri.

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah sistem pelayanan fiskal yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berpengaruh terhadap penerimaan kas negara.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa penerapan sistem pelayanan fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan kas dimana dengan menerapkan sistem pelayanan yang baik serta pengawasan fiskal dapat meningkatkan penerimaan pajak negara di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan. Hal itu terbukti dari :

1. Pengawasan pembayaran fiskal luar negeri di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan dilakukan terhadap bagi pengguna Fasilitas Bebas Langsung dan Fasilitas Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN). Penumpang yang memiliki tiket, harus melakukan chek in terlebih dahulu di counter chek in sesuai dengan air lines yang akan dinaiki untuk mendapatkan boarding pass.
2. Penumpang yang diwajibkan membayar fiskal, langsung menuju loket pembayaran fiskal yang terdapat di bandara Polonia Medan. Dengan tersedianya loket pembayaran fiskal di Bandara Polonia Medan, maka sangat membantu bagi penumpang untuk melakukan pembayaran fiskal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : PENGARUH SISTEM PELAYANAN FISKAL TERHADAP PENERIMAAN KAS NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangannya, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, M.Ec., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, MSi., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univeritas Medan Area dan sekaligus Sebagai Ketua Meja Hijau.
3. Bapak Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM, Selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi hingga selesai.
4. Ibu Saribulan Tambunan SE., Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Ekonomi Univeritas Medan Area.
6. Bapak Abdul Wahid Siregar Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia serta rekan-rekan pegawai di Seksi Fiskal yang telah banyak membantu dalam pemberian data.
7. Yang tercinta Ayahanda Drs. Wagiran Uddin dan Ibunda Winarti dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nasihat, bimbingan dan doanya selama ini kepada penulis, yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
8. Buat Istriku yang tercinta Nurdiana Tanjung SE., yang selalu memberi dorongan/ motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan.
9. Buat rekan-rekan kuliah yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Medan, 2008

Penulis

(Muhammad Muhajir)

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	2
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Pajak dan Fiskal Luar Negeri.....	6
B. Pembebanan dan Pembebasan Fiskal Luar Negeri	8
C. Sistem Pembayaran Fiskal Luar Negeri	17
D. Pengawasan Pembayaran Fiskal Luar Negeri.....	18
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN	
A. Gambaran Umum.....	21
B. Pembebanan dan Pembebasan Fiskal Luar Negeri	33

C. Sistem Pembayaran Fiskal Luar Negeri	44
D. Pengawasan Pembayaran Fiskal Luar Negeri	47
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan	24

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Laporan Pengelolaan Fiskal Luar Negeri Bandara Udara Polonia Medan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan Tahun 2005-2007	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan nasional membutuhkan dana, baik dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari devisa. Devisa merupakan dana pembiayaan yang sangat penting bagi pembangunan negara kita. Atas dasar tersebut, maka penggunaan devisa perlu dihemat dan diarahkan pada berbagai usaha produktif. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan pengaturan pembayaran fiskal dalam tahun berjalan bagi orang pribadi yang bertolak ke luar negeri.

Setiap tahunnya jumlah Orang Pribadi yang berangkat ke Luar Negeri melalui Bandara Polonia mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah ini menjadi sorotan dan pengawasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Hal yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia adalah dengan meningkatkan sistem pelayanan fiskal di Bandara Polonia Medan.

Bagi orang pribadi berdomisili di wilayah tertentu yang akan bertolak ke luar negeri diwajibkan terlebih dahulu membayar fiskal. Disisi lain bahwa orang pribadi yang akan berangkat ke luar negeri akan dibebaskan atas pembayaran fiskal luar negeri. Pembebasan ini dapat bersifat langsung yang diberikan oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang dan pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri yang diterbitkan Unit Fiskal Luar Negeri Direktorat Jenderal Pajak.

Menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian pembebasan fiskal luar negeri, maka petugas pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia diwajibkan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas yang telah

ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini tidak dilakukan, untuk menekan terjadinya penyimpangan yang dilakukan Orang Pribadi yang bertolak ke Luar Negeri.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dalam menerapkan sistem pelayanan fiskal di Bandara Polonia Medan sering mendapat suatu kendala. Adapun kendala yang dihadapi adalah masalah pembebasan fiskal, misalnya penyalahgunaan dokumen, yaitu untuk kepentingan pribadi digunakan dokumen dalam rangka dinas. Akibat dari kendala ini penerimaan pajak dari sektor fiskal luar negeri di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia akan berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk memilih judul : Pengaruh Sistem Pelayanan Fiskal Terhadap Penerimaan Kas Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah sistem pelayanan fiskal yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berpengaruh terhadap penerimaan kas negara.

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Chaizi Nasucha, **Solusi Perpajakan Terlengkap, Edisi I**, Penerbit Kerjasama Majalah Berita Pajak, Jakarta, 2000.
- Gunadi, **Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru**, Edisi I, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mardismo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Markus Muda, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Buku Satu, Edisi I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- R. Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi IV, PT. Penerbit Eresco, Bandung, 2000.
- Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, **Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal Control)**, Edisi II, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 118/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 625/KMK.04/2000, **Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi**

Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN, Pasal 2.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 625/KMK. 04/2000, tentang **Pelabuhan Atau Tempat Pemberangkatan Ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Subregional ASEAN, Pasal 1.**

Direktorat Jenderal Pajak, **Fiskal Luar Negeri**, Penerbit Direktorat Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 2005.

S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.